

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008-2015**

Mirta Pikasari

110462201081

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2013. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purpose sampling* sehingga diperoleh 3 Kabupaten dan 2 kota yang menjadi sampel. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data skunder yang bersumber dari Dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2008-2013 dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpkpd.go.id). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang diolah dengan SPSS. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Pendapatan Asli Daerah secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara bersama-sama (simultan) DAU, DAK, PAD, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013.

**Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan
Belanja Daerah.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU. Daerah memiliki kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan hembusan reformasi yang masih berlangsung, tuntutan pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional, dan nyata, tidak lagi sekedar jargon politik. Demikian pula, tuntutan atas pemerintah yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dengan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan mencegah ketimpangan antar daerah. Demikian

pula daerah harus menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah, harus mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Otonomi daerah menekankan terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Wulandari, 2014).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 tumbuh 7,32% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 7,11%. Belanja pemerintah tumbuh sedikit melambat dari 5,07% menjadi 5,03%. Total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau (gabungan Kabupaten/Kota dan Provinsi) mencapai 26,56% dari total rencana belanja, dengan porsi terbesar untuk belanja operasi sebesar 83,56%, dan porsi belanja modal sebesar 16,44%. Adapun realisasi belanja operasi sebesar 31,05% dari

anggaran, dan realisasi belanja modal tercatat masih kecil yaitu sebesar 11,43% dari total anggaran.

Untuk memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah perlu mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dengan porsi yang lebih besar sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah dengan judul “*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau?

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau?
5. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Prvinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau acuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Belanja Daerah. Selain itu juga dapat diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakann di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Batasan aspek dalam penelitian ini adalah hanya terhadap Laporan APBD, berkaitan dengan nilai realisasi DAU, DAK, PAD, DBH, dan Pajak Daerah dibandingkan dengan Belanja Daaerah.
2. Batasan lokasi dalam penelitian ini adalah hanya 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Batasan waktu penelitian ini hanya meliputi tahun 2008-2013.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, pajak daerah, dan pembiayaan pemerintah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Bastian (2001), Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Nordiawan (2007) secara definisi, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Menurut Suparmoko dalam Handayani dan Nuraina (2012), dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkrakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan public antar daerah dengan member prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup (Handayani dan Nuraina, 2012).

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Sulistyowati dalam Nazarullah (2012) menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang dikelola secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Mardiasmo dalam Aprilia dan Saputra (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara garis besar PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakatnya dan juga hasil pengelolaan sumber daya ekonomi asli daerah secara mandiri berdasarkan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dari pemerintah pusat (Nazarullah, 2012)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan belanja daerah telah banyak dilakukan dan terus berkembang diantaranya dikutip dari beberapa sumber penelitian tersebut, antara lain:

Penelitian Handayani dan Nuraina (2012), tentang pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah. Menyatakan bahwa pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika variabel pajak daerah dan dana alokasi khusus ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja daerah dan sebaliknya.

Maimunah (2006) melakukan penelitian mengenai flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima kemungkinan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: pertama, besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui terjadi tidaknya flypaper effect juga diterima, hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah. Ketiga, hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh flypaper effect dalam memprediksi belanja daerah periode ke depan juga diterima. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi. Kelima, dari hasil hipotesis yang kelima ini tidak dapat diterima, dengan kata lain tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah bidang

pendidikan, namun telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

Sedangkan penelitian Wulandari (2014), mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Dengan hasil penelitian bahwa dana bagi hasil (DBH) menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

H₁: Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

H₂: Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

H₃: Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

H₄: Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

H₅: Diduga Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen (variabel terikat atau variabel Y) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Sedangkan variabel independen (variabel bebas atau variabel X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Sangaji dan Sopiah (2010:185) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2008-2013.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sangaji dan Sopiah, 2010:186).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purpose sampling*. Metode *purpose sampling* merupakan metode pengambilan sampel

dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpkpd.go.id) tahun 2008-2013.
2. Kabupaten/Kota yang membuat Laporan Realisasi APBD dalam format SAP.
3. Kabupaten/Kota yang melaporkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah.
4. Jumlah PAD,DAU,DAK,DBH, dan Belanja Daerah tidak (-) mines atau tidak (0) nol.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala secara numerik. Sedangkan sumber data tersebut merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu yang diperoleh dari data APBD tahun 2008-2013 yang bersumber dari Dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Kepri yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan menjadi dokumentasi. Dan diperoleh secara tidak langsung melalui situs website Departemen

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contohnya: data yang sudah tersedia ditempat-tempat tertentu, seperti BPS, kantor-kantor, dan sebagainya (Hasan, 2004:19).

3.5 Metode Analisa Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari data penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2013:160)

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisa parametrik seperti regresi linier mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal (Duwi Priyatna dalam Handayani dan Nuraina, 2012).

3.5.2.2 Multikolinieritas

Istilah *multikolinieritas* diperkenalkan oleh Frisch. Pada mulanya istilah itu berarti terdapat hubungan yang sempurna (pasti) antar variabel bebas. Hal ini mengakibatkan varians (*standard error*) koefisien regresi sampel mempunyai nilai tidak terbatas. Sehingga koefisien regresi akan tidak signifikan berbeda dari nol (Mulyono, 2006:264).

Pada umumnya hubungan antara variabel bebas adalah tidak sempurna. Jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi standar akan lebih besar dibandingkan jika tidak ada multikolinieritas sama sekali. Akibat selanjutnya, statistika *t* cenderung makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013: 105).

3.5.2.3 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dan residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas (Priyatno dalam Handayani dan Nuraina, 2012).

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139).

3.5.2.4 Autokorelasi

Menurut Priyatno (dalam Handayani dan Nuraina,2012), autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi secara residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013: 110).

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh DAU, DAK, PAD, dan DBH terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja daerah. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2013).

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Untuk menguji masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 diuji dengan menggunakan uji t . Pada uji t , nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, demikian juga sebaliknya.

3.5.4.3 Uji Statistik F (Signifikansi Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen (Ghozali, 2013).

Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Terdapat 5 Kabupaten dan 2 Kota dan diperoleh 3 Kabupaten dan 2 Kota yang memenuhi kriteria *purposive*

sampling. Terdapat 2 Kabupaten yang tidak dijadikan sampel karena DAU, DAK, PAD, DBH, dan Belanja Daerah tidak tertera dalam laporan realisasi anggaran APBD tahunan.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

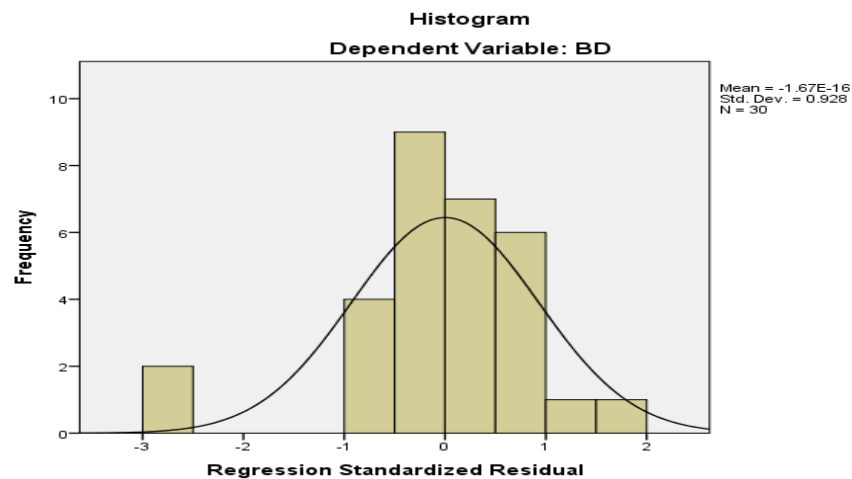
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	30	31459	1675134	657694.60	390282.968
DAU	30	11510	528840	208132.87	117270.882
DAK	30	432	59434	17897.67	16020.985
PAD	30	10242	4070344	339521.43	767748.853
DBH	30	9295	463453	264238.80	116468.581
Valid N (listwise)	30				

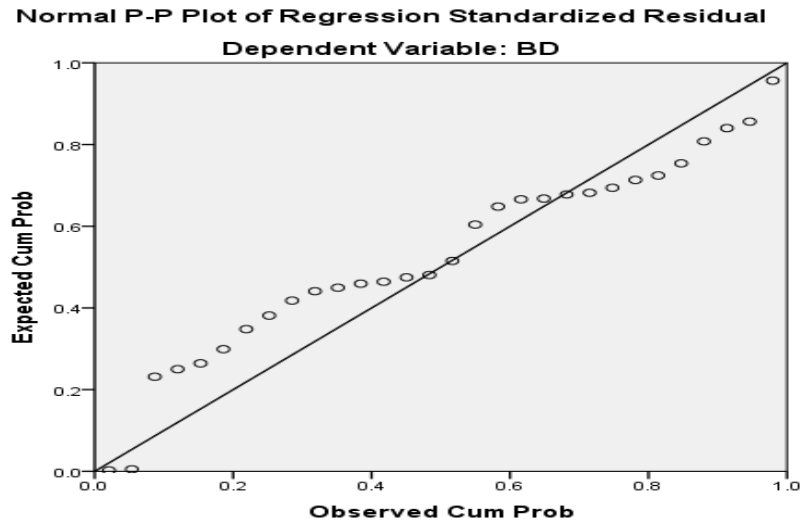
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas





Pada grafik histogram terlihat seperti pola terdistribusi normal. Namun kesimpulan dengan grafik histogram ini belum dapat dipastikan kenormalan datanya untuk jumlah yang kecil. Begitu juga pada grafik P-Plot, sekilas memang terlihat normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normal. Namun, hasil dengan grafik P-Plot ini juga masih belum bisa dipastikan kenormalannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti dan meyakinkan dilakukan uji statisti non parametrik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi diatas 0,05 ($> 0,05$), maka data terdistribusi dengan normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	200971.455549
	Absolute	.148
Most Extreme Differences	Positive	.096
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.811
Asymp. Sig. (2-tailed)		.526

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $> 0,05$ yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,811 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,526. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *VIF* yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-138226.764	123020.036			
1 DAU	1.513	.583	.455	.346	2.893
DAK	5.502	2.645	.226	.900	1.112
PAD	.084	.060	.165	.765	1.307
DBH	1.340	.621	.400	.309	3.237

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 ^a	.735	.692	216452.882	1.817

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

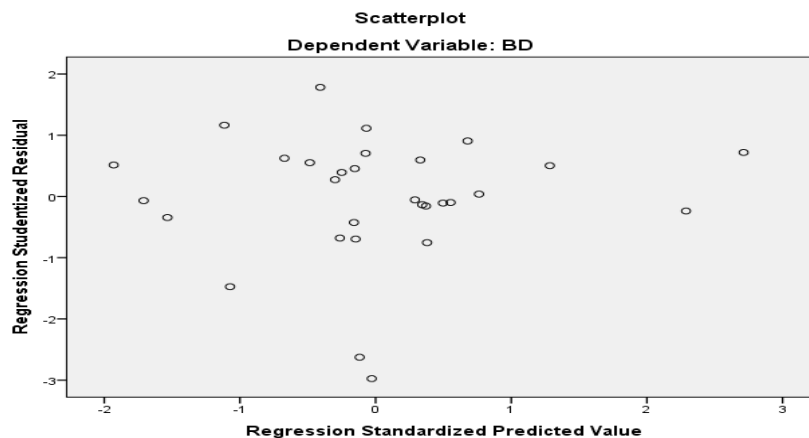
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. Bila angka $DW < -2$ berarti ada autokorelasi yang positif
- b. Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Bila angka $DW > 2$ berarti ada autokorelasi negative

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,817. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan jumlah observasi 30 ($n=30$) dan variabel independen (k) sebanyak 4, maka dari tabel statistik Durbin-Watson (DW) didapat nilai d_l sebesar 1,1426 dan nilai d_u 1,7386. Leh karena nilai DW 1,817 lebih besar dari batas atas (d_u) 1,7386 dan kurang dari $4-d_u$ (4-1,7386), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja daerah berdasarkan masukan variabel independen DAU, DAK, PAD, dan DBH.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-138226.764	123020.036		-1.124	.272
1 DAU	1.513	.583	.455	2.596	.016
DAK	5.502	2.645	.226	2.080	.048
PAD	.084	.060	.165	1.399	.174
DBH	1.340	.621	.400	2.158	.041

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.735	.692	216452.882

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Dari tabel diatas dapat dilihat ahwa angka R disebut koefisien korelasi antara variabel DAU, DAK, PAD, DBH dengan Belanja Daerah adalah 0,857. Ini artinya hubungan antara DAU, DAK, PAD, DBH dengan Belanja Daerah adalah sangat kuat (signifikan) sebesar 85,7%. *Adjuster R2* dalam penelitian ini sebesar 0,692, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,2 % Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Kepri dipengaruhi oleh DAU, DAK, PAD, dan DBH. Sedangkan sisanya sebesar 30,8 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3246006807098. 127	4	811501701774.5 32	17.321	.000 ^b
Residual	1171296252419. 074	25	46851850096.76 3		
Total	4417303059517. 201	29			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

4.5.3 Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-138226.764	123020.036		-1.124	.272
	DAU	1.513	.583	.455	2.596	.016
	DAK	5.502	2.645	.226	2.080	.048
	PAD	.084	.060	.165	1.399	.174
	DBH	1.340	.621	.400	2.158	.041

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki nilai Sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel PAD memiliki nilai Sig lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, DAK, PAD, dan DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diterima.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Hal ini berarti hipotesis yang kedua diterima.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013. Hipotesis yang keempat ini juga diterima.
5. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2013. Hal ini berarti hipotesis yang kelima atau hipotesis yang terakhir yang mengatakan bahwa DAU, DAK, PAD, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diterima secara signifikan.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memerikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.
4. Dalam kajian Belanja Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.